

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2003). Peranan sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kualitas sangat mutlak dibutuhkan dalam pembangunan. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.

Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga timbul angka pengangguran yang tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemauan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian (Kuncoro, 2004).

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius di Indonesia karena dampak dari adanya pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial, orang-orang yang menganggur suatu saat bisa kehilangan kepercayaan dirinya sehingga dapat menimbulkan tindakan kriminal, perselisihan dengan masyarakat dan sebagainya. Pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang harus di atasi.

Masalah pengangguran menjadi momok yang menakutkan bagi negara negara berkembang. Bukan hal yang mudah untuk mengatasi masalah pengangguran, karena secara umum pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai kegiatan apapun artinya mereka tidak mempunyai pekerjaan atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja, sehingga mengakibatkan bertambahnya para pencari kerja seiring dengan hal tersebut maka akan bertambahnya jumlah tenaga kerja.

Jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 6,87 juta penduduk, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,01 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Februari 2018 mencapai 193,55 juta penduduk, naik dari Februari 2017 sebesar 190,59 juta penduduk, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,13%, turun dari Februari 2017 sebesar 5,33% (Badan Pusat Statistik).

Sedangkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah mencapai 2,67%, Sekolah Menengah Pertama

(SMP) 5,18%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,19%, Diploma I-III 7,92% dan Universitas sebesar 6,31% (Badan Pusat Statistik).

Tumbuhnya pengangguran tak lepas dari luputnya perhatian pemerintah terhadap desa-desa yang ada di negeri ini. Kurangnya perhatian pemerintah telah menjadikan masyarakat pedesaan enggan tinggal di desa dan memilih pergi ke kota. Di kotapun mereka tetap kalah bersaing. Betapa tidak, selama di desa mereka tidak dibekali pendidikan yang mumpuni. Ujung-ujungnya mereka menghasilkan masalah baru. Lantas, pemerintah kota akan berusaha untuk mengembalikan mereka ke daerah asalnya. Tentu saja memilih solusi praktis dengan mengembalikan mereka ke desa tanpa memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak adalah sebuah kejahatan. Dan ini bukan lagi persoalan pemerintah lokal melainkan sifatnya nasional dan harus kita selesaikan secara nasional pula.

Pengangguran di kota jauh lebih tinggi dari tingkat pengangguran di desa. Pengangguran di kota Februari 2018 mencapai 6,34%, sementara pengangguran di desa hanya 3,72%. keduanya turun dari kondisi Februari 2017 yang masing-masing sebesar 6,5% dan 4% (Badan Pusat Statistik).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan hasil hutan juga memiliki persoalan pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Sumatera Barat menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 2,74 juta orang, naik 124,40 ribu orang dibanding Februari 2017. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2018, sebanyak 2.59 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 152,24

ribu orang menganggur. Pada 2017 jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 124,06 ribu orang dan pengangguran bertambah 341 orang.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2018, TPT di perkotaan sebesar 6,69 persen, sedangkan TPT pada wilayah perdesaan sebesar 4,56 persen. Dibandingkan agustus 2017, TPT wilayah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dan wilayah perdesaan mengalami penurunan 0,15 persen (Bps Sumbar).

Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. Semakin tinggi tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.

Menurut Mankiw (2003), pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA ke atas. Pengangguran terdidik merupakan sebuah keadaan dimana tenaga kerja terdidik mengalami kondisi sulit untuk mendapatkan pekerjaan, alasannya bukan karena tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka, namun karena tenaga kerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan menengah ke atas akan lebih memilih menunggu waktu (menganggur) dari pada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, hal ini berkaitan dengan upah yang diterima. Dari segi ekonomis, pengangguran terdidik mempunyai

dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran kurang terdidik jika ditinjau dari kontribusi yang gagal diterima di lapangan kerja.

Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat bersaing di dunia kerja.

Diagram Tabel 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2017-Februari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar, 2018

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan yaitu sebesar 9,52 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,50 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat

dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,34 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami penurunan pada tingkat pendidikan SD ke bawah, dan SMP sederajat, Sementara TPT pada jenjang SMA sederajat. Sementara TPT pada jenjang SMA sederajat, Diploma I/II/III, SMK dan Universitas mengalami penurunan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka akan ada kesempatan berkembang untuk perusahaan dan para pencari kerja. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan keberhasilan ekonomi suatu daerah. Perusahaan juga akan memproduksi barang dan jasa yang lebih oleh karena itu akan membutuhkan pekerja yang mampu untuk bekerja diperusahaan tersebut.

Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah maka barang dan jasa yang diminta akan sedikit sehingga akan mengurangi permintaan konsumen dan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Angka pengangguran yang rendah mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut sejahtera.

Tingkat inflasi juga menjadi satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu wilayah atau negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu wilayah atau negara tersebut.

Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja

untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Alghofari, 2011)

Permasalahan pengangguran sangat kompleks untuk dibahas, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2010), yang meneliti tentang Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia tahun 1980-2007 yang bertujuan menganalisis hubungan jumlah penduduk, besaran upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif dan lemah terhadap jumlah pengangguran.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji lebih dalam lagi kondisi pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Judul penelitian yang akan diangkat adalah: “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi/PDRB terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh upah terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat ?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi/PDRB terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran terdidik Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait baik pemerintah maupun pihak swasta, terutama bagi pemerintah dalam memajukan perekonomian di Sumatera Barat.
3. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik terutama di Sumatera Barat